

Fungsi Pengawasan Pejabat Struktural Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa

Jurnal Administrativus Vol 2 No 4, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

Loresia Arlin Palopak^{1*}, Thelma Wawointana², Jeane Mantiri³

¹²³Prodi Ilmu Adminitrasi Negara, Universitas Negeri Manado Tondano

Email: ¹Arlynpalopak@gmail.com*; ²Thelmawawointana@unima.ac.id; ³Jeanelitha@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords: Supervision Function, Structural Officer, Disdukcapil Minahasa Regency

Accepted: 5 Oktober 2024

Revised : 10 Oktober 2024

Published: 31 Oktober 2024

ABSTRACT

This study aims to know, analyze, and describe the supervision function of structural officials at the Office of the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency. The research method used is descriptive Kulitatif. The number of informants in this study was 8 people. Data collection is done using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis is done through data reduction, data presentation, and conclusions. Supervision Function of Structural Officials at the Office of the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency. The determination of employee work standards at the Minahasa Regency Population and Civil Registration Office refers to the SOP used, but overall, the main duties of the functions carried out by employees have not been based on existing SOPs because, based on the results, there are factors that influence employees in carrying out their main duties and functions, so that in the supervision function of structural officials.

INTISARI

Kata Kunci:

Fungsi Pengawasan, Pejabat Struktural, Disdukcapil Kabupaten Minahasa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan fungsi pengawasan pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kulitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fungsi Pengawasan Pejabat Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Penetapan standar kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa mengacu pada SOP yang digunakan, namun secara keseluruhan tugas pokok fungsi yang diemban pegawai belum berdasarkan SOP yang ada karena berdasarkan hasil terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam fungsi pengawasan pejabat struktural.

I. PENDAHULUAN

Dalam hal ini otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .[1] Banyak ahli manajemen yang mempunyai pandangan berbeda mengenai pengawasan karena pengawasan merupakan salah satu tugas manajemen yang sangat penting bagi dinamika,perkembangan,dan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berfungsi secara organik dan mudah.Oleh karena itu,penting bagi seorang pemimpin untuk melakukan tindakan pengawasan secara rutin terhadap pegawainya dalam upaya meningkatkan kinerjanya dan mampu menjalankan pemerintahan,pembangunan dan masyarakat melalui pengawasan. Tugas pokok seorang pemimpin antara lain memimpin,merumuskan, mengorganisasikan,membina,mengendalikan meng-kondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa masih terus melanggar kebijakan yang telah ditetapkan,misalnya beberapa pegawai terus datang terlambat ke kantor atau tidak hadir pada apel pagi,dan beberapa pegawai bahkan ditemukan diluar kantor pada waktu tersebut,pada jam kerja meninggalkan kantor bahkan ada yang memilih untuk menambahkan hari liburnya sendiri ke dalam daftar bukan hari libur yang tidak mereka laporkan ke tempat kerja. Namun beberapa pekerja datang dan berangkat dari tempat kerja di luar jam kerja normal, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan serta kelalaian dalam pelayanan seperti nomor loket antrian yang selalu kosong faktor tersebut dipegaruhi oleh aspek budaya dalam kehidupan sehari – hari yang tercermin,dalam sikap perilaku,hal ini yang menyebabkan penyelesaian tugas dan kewajiban tidak tepat waktu,sehingga mengakibatkan pelayanan tidak berjalan maksimal karena masih terdapat kesalahan pada pegawai,hal ini berarti kurangnya tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan,sehingga mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan di masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari atasan (pimpinan) terhadap pegawai sehingga tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

Organisasi merupakan batang tubuhnya , sedangkan manajemen adalah penggerak dari batang tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan terus berkembang serta semakin baik. Dalam organisasi ada sistem yang dijalankan oleh seorang pemimpin untuk melakukan berbagai tindakan organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan bersama.Kemudian pemimpin yang akan mengatur dan mengakomodasi seluruh sel-sel organisasi untuk berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang diharapkan dan bersandar pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemimpin yang akan mengendalikan dalam penyelenggaraan organisasi, mau dibawa kemana organisasi tersebut dengan pola bagaimana, sehingga berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan. [2]

Manajemen adalah proses pengorganisasian, perencanaan memimpin, dan mengawasi kerja anggota organisasi serta pemanfaatan sumber daya tambahan organisasi guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[3]Manajemen pelayanan publik adalah manajemen pemerintah, yang mengandung makna bahwa manajemen publik bertujuan untuk merencanakan , mengatur , dan mengendalikan pelayanan kepada masyarakat. [4]

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen,suatu rencana yang dilaksanakan atau program tentunya harus diiringi dengan pengawasan tanpa diiringi dengan sistem pengawasan akan mengakibatkan lambatnya ataupun tidak tercapainya suatu sasaran atau suatu tujuan. [5]

Pengawasan adalah sebagian besar terdiri dari membandingkan apa yang dilakukan dengan rencana,standar,norma,atau tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang perlu di ukur.[6]

Berikut indikator pengawasan :

1. Penetapan standar kerja dalam pengawasan artinya menetapkan standar pelaksanaan yang mengacu pada unit pengukuran yang dapat berfungsi sebagai titik acuan untuk menilai hasil, disiplin pegawai menjadi dimensi yang perlu diukur.
2. Pengukuran hasil kerja , apabila tidak ada cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya maka pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan menjadi tidak efektif , cara kerja yang dilakukan di kantor atau lapangan merupakan dimensi indikator diukur.
3. Tindakan koreksi,apabila pelaksanaan menyimpang dari standar,pengawas harus mengembalikan tindakan

perbaikan, aspek yang diukur adalah penilaian pimpinan terhadap pelaksanaan tugas yang menyimpang. [7]

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang cenderung fokus pada proses pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam serta alamiah. Dengan demikian diharapkan melalui pendekatan kualitatif ini dapat menghasilkan data secara sistematis, factual dan akurat sehingga dapat menggali lebih. [8] Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama yaitu space (ruang tempat), actor (pelaku), activity (aktivitas):

1. Pendekatan kepada subjek penelitian (informan)
2. Wawancara dengan tokoh dan pemangku kepentingan, kemudian peneliti menggunakan 3 tahap pengumpulan data yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. [9] Teknis analisis data ada 3 tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. [10] Dengan menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu reliabilitas (rehabilitasi), konfirmabilitas (objektivitas), transferabilitas (validasi eksternal) dan kredibilitas (validasi internal). [11]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa bertugas memberikan bantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta kegiatan lain yang ditugaskan sesuai dengan parameter mandatnya di Kabupaten Minahasa, tanggungjawab DUKCAPIL mencakup pengurusan berbagai surat, termasuk KTP Elektronik (juga dikenal sebagai E-KTP), dokumen kependudukan, Kartu Keluarga (KK), akta nikah, akta pindahan dan akta kelahiran. Oleh karena itu, efektivitas fungsi pengawasannya ditentukan oleh seberapa baik kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan kantor.

1. Penetapan standar kerja

Penetapan standar kerja adalah kumpulan atau prinsip yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengukur seberapa baik kinerja pegawainya. Standar kerja menetapkan persyaratan jumlah output, kualitas, waktu, dan biaya yang dibutuhkan pegawai saat mereka melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan dengan temuan terkait Fungsi Pengawasan Pejabat Struktural Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penetapan standar kerja pegawai yang ada pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Minahasa mengacu pada SOP yang dipakai, namun secara keseluruhan tugas pokok fungsi yang dikerjakan oleh pegawai belum berdasarkan dengan SOP yang ada, karena berdasarkan dengan hasil yang ditemui bahwa ada faktor yang mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, sehingga dalam Fungsi Pengawasan Pejabat Struktural Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, berdasarkan dengan penetapan standar kerja belum optimal.

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum tercapai serta mengoreksi bagi pelaksanaan yang terselesaikan sesuai dengan rencana. Pengawasan sebagai fungsi dari manajemen merupakan tahapan yang penting dari proses manajemen, dimana dengan pengawasan bisa dilihat apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. [12]

Pengawasan mencakup penilaian kinerja kerja dan jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. [13]

2. Pengukuran Hasil Kerja

Pengukuran hasil kerja disebut proses pengumpulan, evaluasi atau pelaporan data tentang kinerja

seseorangkelompok,organisasi,sistem,atau komponen. Berdasarkan dengan temuan terkait Fungsi Pengawasan Pejabat Struktural Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa,peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam pengukuran hasil kerja harian, namun berdasarkan laporan itu didapati bahwa kinerja yang diberikan oleh pegawai dari 100%/ hanya 30% yang berdasarkan dengan SOP ada beberapa pegawai yang belum sesuai dengan SOP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didapati bahwa pekerjaan belum berdasarkan dengan SOP . Pegawai masih belum disiplin waktu dalam data kantor , pekerjaan yang memakan waktu yang lama , banyak pegawai di jam makan siang sampai pulang belum balik ke kantor , masih banyak pegawai yang kurang paham akan pekerjaan yang diberikan. Ada beberapa bentuk pengawasan atau pengendalian yang dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: internal kontrol,audit kontrol,eksternalkontrol,format,kontrol, informal kontrol. [14]

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan data yang diperoleh terkait Fungsi Pengawasan Pejabat Struktural pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa , dapat di tarik kesimpulan bahwa belum maksimal dan optimal hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Penetapan standar kerja pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa menggunakan SOP dalam menentukan standar kerja pegawai namun secara keseluruhan tugas pokok fungsi yang dikerjakan oleh pegawai belum berdasarkan dengan SOP yang ada , karena berdasarkan dengan hasil yang ditemui bahwa ada faktor yang mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, sehingga dalam fungsi pengawasan Pejabat Struktural Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa , berdasarkan dengan penetapan standar kerja belum optimal.
- 2) Pengukuran Hasil Kerja pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ada namanya laporan hasil kerja harian,namun berdasarkan laporan itu didapati bahwa kinerja yang diberikan oleh pegawai dari 100% hanya 30% yang berdasarkan SOP , ada berapa pegawai yang belum sesuai dengan SOP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didapati bahwa pekerjaan belum berdasarkan dengan SOP . Pegawai masih belum disiplin waktu dalam datang kantor ,pekerjaan yang memakan waktu yang lama , banyak pegawai yang kurang paham akan pekerjaan yang diberikan.

REFERENSI

- [1] Andrea,D.L. (2020). Penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*,1(2),157-165
- [2] Pangkey,I., & Rantung , M.I.R. (2023). Manajemen Pelayanan Publik. *Penerbit Tahta Media*.
- [3] Handoko. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan, Pertama. Bandung: Pustaka Setia,Bandung
- [4] Abdul.Ghofur,(2020).Falsafah Ekonomi Syari’ah, Depok : PT Raja Grafinondo Persada, hlm 123
- [5] Pangkey,I., Langkai, H.J., & Mokat, J. H.(2014). Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai). *Academy of Education Journal*, 15(1), 969-977.
- [6] Febriani, Nufian S dan Dewi, Wayan Weda Asmara. 2019. Perilaku Konsumen di era digital.UB Press.Hal 12
- [7] Febriani, O. (2022). Pengaruh Pengawasan Komitmen Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perumdam Tirta Satria Banyumas (Doctoral dissertion Universitas Muhammadiyah Puwokerto).
- [8] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif . Alfabeta
- [9] Dr. Farida Nugrahani, M.H. (2019). Dalam buku Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
- [10] Sugiyono . (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta
- [11] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta
- [12] Tarore,S.,Dilapanga,A.,& Djani,T.(2021).Pengawasan Minuman Berolkohol diKecamatan Remboken Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Admnistrasi Negara*,3(2),29-36.
- [13] Manullang, 2019, Dasar – Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan, Gajah Mada Press, Jakarta.
- [14] MalayuS.P.Hasibuan.(2015). Manajemen:Dasar,Pengertian,dan masalah , Jakarta; Bumi Aksara
- [15] K. Kartono, “Pemimpin dan kepemimpinan.” repository.pelitabangsa.ac.id, 2018, [Online]. Available: <http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/1579>.